

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Fitriani Mansur^a, Eko Prasetyo^{b*}, Reka Maiyarni^c

^{a,c}*Jurusan Akuntansi, Universitas Jambi, Indonesia*

^a*Jurusan Akuntansi, Universitas Jambi, ekoprasetyo@unja.ac.id, Indonesia*

Abstract. Financial management of regional governments must be based on good governance government, that financial management is conducted transparently and accountably. Public financial management. UU No.17/2013 regulates the state finances which requires the form and content of the accountability report. One form of accountability report is the government's financial statements. Based on PP 17/ 2010, the reliability of financial reporting is the information in the financial statements. This type of research is descriptive quantitative research. The population in this study are all the Head of Department, Head of the Section and District Government Kasubbagian in Muaro, the sample used is as much as 83 respondents. This analytical tool used to determine the effect of the application of financial supervision, internal control systems, human resources, and the use of technology affect the value of local financial reporting information by using multiple linear regression. The results showed that the area of financial supervision, internal control systems, human resources, information technology influence simultaneously on the value of the local government financial reporting information, financial supervision only partially affect the indigo area of financial reporting information.

Keywords: financial supervision area, internal control systems, human resources, information technology, information value

Pendahuluan

Pengelolaan pemerintah daerah yang baik harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal (1) butir (4) menyebutkan bahwa "Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sumarlin (2004) bahwa dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, maka kebutuhan terhadap peran pengawasan akan semakin meningkat. Pengawasan perlu dilaksanakan secara optimal, yaitu dilaksanakan secara efektif dan efisien serta bermanfaat bagi audit (organisasi,

*Corresponding author. E-mail: ekoprasetyo@unja.ac.id

pemerintah dan negara) dalam merealisasikan tujuan/program secara efektif, efisien dan ekonomis.

Upaya untuk mewujudkan *good governance* telah lama direncanakan, salah satunya adalah dengan membangun instrumen peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat adalah yang berkenaan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. UU No. 17 Tahun 2003 merupakan bentuk konkrit dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. UU No. 17 mengatur mengenai keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban.

Salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban adalah laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada DPR/DPD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan tersebut disampaikan berdasarkan komponen yang ada di dalamnya, antara lain laporan realisasi anggaran.

Pemerintah harus memperhatikan informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2010, keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keterandalan merupakan salah satu unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah penerapan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah?
2. apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah?
3. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah?

4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah?
5. Apakah penerapan pengawasan keuangan, sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah?

Kajian Literatur

Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan adalah seperangkat laporan keuangan dan informasi-informasi yang lainnya untuk melaporkan keadaan keuangan dari suatu kesatuan usaha. Informasi keuangan menunjukkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan yang digunakan oleh pemakainya sesuai dengan kepentingan masing-masing. Pengertian laporan keuangan menurut PSAK No. 1 Tahun 2009 merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap dari laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas, laporan perubahan modal, catatan dan laporan serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah *output* dan hasil akhir dari proses akuntansi. Oleh sebab itu, laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban (*accountability*) dan juga menggambarkan indikator kesuksesan suatu saat tertentu, sedangkan aktivitas operasi dilaporkan untuk suatu periode tertentu.

Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Menurut Suwardjono, nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar manfaat dan tujuan penyampaian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi dikatakan mempunyai nilai apabila informasi tersebut:

1. menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, atau masa mendatang.
2. menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian.
3. mengubah keputusan atau perilaku para pemakai.

Informasi bernilai jika informasi tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pemakainya. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk dari informasi, di mana pemakainya akan menggunakan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan baik itu untuk pihak intern maupun pihak ekstern.

Pengawasan Keuangan Daerah

Keuangan negara diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 yang mengatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan pengawasan diatur dalam PP No. 17 Tahun 2005 Pasal 1, tentang pedoman dan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyebutkan, bahwa pengawasan pemerintah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 51 Tahun 2010). Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*eksternal control*).

Sistem Pengendalian Intern

Pengertian pengendalian intern dijelaskan dalam PP No. 8 Tahun 2006 dan PP No. 60 Tahun 2008. Menurut PP No. 8 Tahun 2006, sistem pengendalian intern adalah (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam

pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sedangkan menurut PP No. 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan keuangan daerah harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan dan pendidikan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi guna mencapai tujuannya.

Menurut Notoatmodjo (2003), ukuran sumber daya manusia dapat dilihat dari pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman.

- a. Pendidikan dibagi menjadi: pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal.
- b. Pelatihan yang diberikan tenaga ahli, pelatihan yang tepat, materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan pemakai.
- c. Pengalaman dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi dan prestasi pekerjaan.

Teknologi Informasi

Permendagri No. 59 Tahun 2007 menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Teknologi informasi memiliki lima fungsi pokok (Abdul, 2002), yaitu mengumpulkan data, pengolahan data, pelaporan data, penyimpanan data dan pengiriman data. Tujuan utama dari teknologi adalah menyediakan informasi untuk berbagai tujuan kegiatan manajerial dan penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam berbagai tingkat operasi di dalam organisasi.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- H1: Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- H2: Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- H3: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- H4: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- H5: Penerapan pengawasan keuangan, sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang didasarkan atas survei terhadap objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk persepsi atau jawaban responden (sampel) penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner yang diberikan kepada responden dengan jenis pernyataan yang bersifat tertutup. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1
Responden yang Digunakan Sebagai Sampel

No	Nama Instansi	Kepala Dinas	Kabag/ Kabid	Kasubag/ kasubbid	Jml
1.	Dinas Pendidikan	1	3	5	9
2.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1	3	5	9
3.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	3	5	9

No	Nama Instansi	Kepala Dinas	Kabag/ Kabid	Kasubag/ kasubbid	Jml
4.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1	2	4	7
5.	Dinas Pekerjaan Umum	1	3	4	8
6.	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	1	3	4	8
7.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultur	1	4	3	8
8.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1	4	3	8
9.	Dinas Pendapatan Daerah	1	4	4	9
10.	Dinas Kesehatan	1	3	4	8
11.	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	1	3	4	8
Jumlah					83

Pertanyaan yang diajukan berjumlah 40 pertanyaan yang berhubungan dengan variabel yang dianalisis dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh pengawasan keuangan daerah (X1), sistem pengendalian intern (X2), sumber daya manusia (X3) dan teknologi informasi (X4) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan (Y) yang diukur dengan menggunakan skala ordinal.

Dalam analisis data pada penelitian ini digunakan model persamaan yaitu model regresi linear berganda yang diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Di mana:

Y = Nilai Informasi Laporan Keuangan

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

Hasil dan Pembahasan

Pengujian Instrumen Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Jambi. Kuesioner yang dibagikan sebagai instrumen dalam pengelolaan data sebanyak 83 eksemplar. Kuesioner tersebut berisi item pernyataan yang terdiri dari 7 pernyataan tentang nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y), 7 pernyataan tentang pengawasan keuangan daerah (X1), 10 pernyataan tentang sistem pengendalian intern (X2), 10 pernyataan tentang sumberdaya manusia (X3), dan 8 pernyataan tentang teknologi informasi (X4). Jumlah kuesioner yang kembali dan layak diuji sebanyak 66 eksemplar atau sebesar 78% dari total keseluruhan kuesioner yang disebar.

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan metode *product moment correlation* melalui program komputer yaitu SPSS 19 for Windows. Validitas dilakukan dengan cara membandingkan r-hitung dan r-tabel dengan ketentuan: jika r-hitung > r-tabel, maka data valid, jika r-hitung < r-tabel, maka data tidak valid.

Berdasarkan hasil pengujian validitas, terdapat item pertanyaan yang menghasilkan koefisien korelatif yang lebih kecil dari nilai r-tabel yaitu item pertanyaan pengawasan keuangan daerah yaitu pertanyaan nomor 6 dan item pertanyaan sistem pengendalian intern yaitu pertanyaan nomor 10. Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan tersebut dinilai tidak mampu mengukur variabel pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern, sehingga harus dihilangkan dari kumpulan indikator tersebut. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang berjumlah 40 pertanyaan ini dinilai telah mampu mengukur untuk lima variabel.

Tabel 2 menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan setelah menghilangkan item pertanyaan nomor 6 dan 10:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas terhadap Item Pertanyaan

Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0,547	0,2423	Valid
2	0,473	0,2423	Valid
3	0,508	0,2423	Valid
4	0,262	0,2423	Valid
5	0,380	0,2423	Valid
6	0,429	0,2423	Valid
7	0,440	0,2423	Valid
8	0,519	0,2423	Valid
9	0,404	0,2423	Valid
10	0,387	0,2423	Valid
11	0,303	0,2423	Valid
12	0,317	0,2423	Valid
13	0,466	0,2423	Valid
14	0,428	0,2423	Valid
15	0,383	0,2423	Valid
16	0,647	0,2423	Valid
17	0,298	0,2423	Valid
18	0,271	0,2423	Valid
19	0,249	0,2423	Valid
20	0,390	0,2423	Valid
21	0,434	0,2423	Valid
22	0,348	0,2423	Valid
23	0,408	0,2423	Valid
24	0,361	0,2423	Valid
25	0,394	0,2423	Valid
26	0,567	0,2423	Valid
27	0,643	0,2423	Valid
28	0,535	0,2423	Valid
29	0,317	0,2423	Valid
30	0,431	0,2423	Valid
31	0,515	0,2423	Valid
32	0,702	0,2423	Valid
33	0,551	0,2423	Valid

Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
34	0,532	0,2423	Valid
35	0,319	0,2423	Valid
36	0,344	0,2423	Valid
37	0,505	0,2423	Valid
38	0,364	0,2423	Valid
39	0,325	0,2423	Valid
40	0,403	0,2423	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2 setiap item pertanyaan menghasilkan koefisien korelatif yang lebih besar dari nilai r-tabel. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang berjumlah 40 pertanyaan ini dinilai telah mampu mengukur variabel penelitian.

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai *crobach alpha* melalui program komputer yaitu SPSS 19 for Windows. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *crobach alpha* > 0,60.

Tabel 3 menyajikan hasil reliabilitas terhadap item pertanyaan terkait dengan pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, teknologi informasi dan nilai informasi pelaporan.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas terhadap Item Pertanyaan

Variabel	Cronbach's Alpha	Alpha Output	Keterangan
Pengawasan Keuangan Daerah	0.701	0.701	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0.730	0.730	Reliabel
Sumber Daya manusia	0.716	0.716	Reliabel
Teknologi Informasi	0.807	0.807	Reliabel
Nilai Informasi Pelaporan	0.689	0.689	Reliabel

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner di atas menghasilkan angka *crobach alpha* lebih besar dari 0,60. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa semua pertanyaan dari variabel dapat dinyatakan reliabel.

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai variabel-variabel penelitian ini seperti pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, teknologi informasi dan nilai informasi pelaporan. Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), deviasi standar dari masing-masing penelitian. Hasil analisis deskriptif dari variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

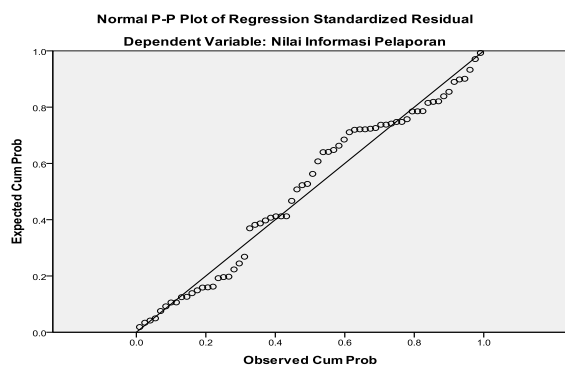
Tabel 4
Hasil Analisis Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
Pengawasan Keuangan Daerah	66	7.636	17.259	12.78621	3.042847
Sistem Pengendalian Intern	66	16.865	33.414	25.46762	4.305362
Sumber Daya Manusia	66	21.853	41.500	30.52483	4.747722
Teknologi Informasi	66	14.246	32.217	25.09892	4.547190
Valid N (listwise)	66	15.128	29.190	23.33379	3.503152

Sumber: Data sekunder yang diolah

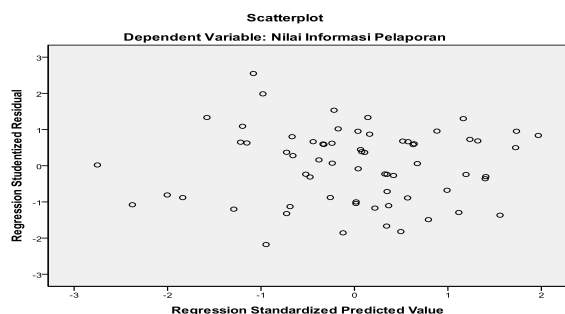
Pengujian Asumsi Klasik

Dari hasil pengujian normalitas terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histrogramnya. Hal ini berarti bahwa nilai residual yang dihasilkan dari regresi berdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik.



Gambar 1. Grafik Normalitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik Scatter Plot.



Gambar 2. Grafik heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil grafik scatterplot pada Gambar 2 menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada

sumbu Y, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Metode pengujian multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) pada model regresi. Kriteriaanya yaitu jika nilai tolerance variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan hasil Tabel 5 bahwa semua variabel menunjukkan nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10 dan VIF yang kurang dari 10. Jadi, dapat dinyatakan bahwa tidak ada multikolinearitas antarvariabel independen dalam model regresi.

Tabel 5
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengawasan Keuangan Daerah	.977	1.024
Sistem Pengendalian Intern	.529	1.891
Sumber Daya Manusia	.521	1.920
Teknologi Informasi	.995	1.005

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berikut hasil uji regresi:

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	24.553	3.645		6.736	.000
Pengawasan Keuangan Daerah	.499	.130	.433	3.827	.000
Sistem Pengendalian Intern	-.127	.125	-.156	-1.017	.313
Sumber Daya Manusia	-.055	.114	-.074	-.481	.632
Teknologi Informasi	-.107	.086	-.138	-1.235	.222

a. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan

Berdasarkan hasil regresi yang terlihat di Tabel 6 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 24.553 + 0.499 X1 - 0.127 X2 - 0.055 X3 - 0.107 X4$$

Dari persamaan regresi linear tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 24.553 memberikan arti bahwa apabila variabel pengawasan keuangan daerah (X1), sistem pengendalian intern (X2), sumber daya

manusia (X3), dan pemanfaatan teknologi (X4) diasumsikan nilainya adalah 0, maka nilai informasi pelaporan keuangan daerah (Y) bernilai 24.553.

2. Koefisien regresi variabel pengawasan keuangan daerah (X1) sebesar 0.499 memberikan arti bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan pengawasan keuangan daerah maka akan terjadi kenaikan nilai informasi pelaporan keuangan daerah sebesar 0.499.

3. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern (X2) sebesar -0.127 memberikan arti bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan sistem pengendalian intern maka akan terjadi penurunan pengawasan keuangan daerah sebesar 0,127.

4. Koefisien regresi variabel sumber daya manusia (X3) sebesar -0.055 memberikan arti bahwa sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan sumber daya manusia maka akan terjadi penurunan pengawasan keuangan daerah sebesar 0,055.

5. Koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi (X3) sebesar -0.107 memberikan arti bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan pemanfaatan teknologi maka akan terjadi penurunan pengawasan keuangan daerah sebesar 0,107.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Tabel 7
Uji R-Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.487 ^a	.237	.187	3.158990

a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia
b. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan

Berdasarkan Tabel 7, didapat nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,187. Ini berarti bahwa kemampuan pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan sangat sedikit yaitu hanya 18,7% dan sisanya sebesar 81,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan secara parsial. Pengujian ini dilakukan pada tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05.

Hipotesis 1. Berdasarkan pada Tabel 6, pengujian variabel pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan menghasilkan nilai statistik t sebesar 3,827 dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,000 ($< 0,05$). Oleh karena nilai *p-value* $< (0,05)$, maka H_1 diterima yang berarti bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan.

Hipotesis 2. Berdasarkan pada Tabel 6, pengujian variabel sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan menghasilkan nilai statistik t sebesar -1,017 dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,313 ($> 0,05$). Oleh karena nilai *p-value* $> (0,05)$, maka H_2 ditolak yang berarti bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan.

Hipotesis 3. Berdasarkan pada Tabel 6, pengujian variabel sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan menghasilkan nilai statistik t sebesar -0,481 dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,632 ($> 0,05$). Oleh karena nilai *p-value* $> (0,05)$, maka H_3 ditolak yang berarti bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan.

Hipotesis 4. Berdasarkan pada Tabel 6, pengujian variabel teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan menghasilkan nilai statistik t sebesar -1.235 dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,222 ($> 0,05$). Oleh karena nilai *p-value* $> (0,05)$, maka H_5 ditolak yang berarti bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan.

Tabel 8
Hasil Uji f
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	188.953	4	47.238	4.734	.002 ^a
Residual	608.732	61	9.979		
Total	797.685	65			

a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia
b. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan

Hipotesis 5. Berdasarkan hasil uji f pada Tabel 8 terlihat bahwa nilai f hitung sebesar 4,734 dengan tingkat signifikansi 0,002. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 maka H_1 diterima.

Dibuktikan dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Ini berarti bahwa pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan.

Pembahasan

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis 1 diketahui bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa pengawasan keuangan daerah di dinas-dinas kabupaten Muaro Jambi telah diterapkan secara efektif, sehingga dapat meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Muaro Jambi.

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang tujuannya untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 51 Tahun 2010). Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*eksternal control*).

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa dengan adanya pengawasan yang efektif dan sistematis terhadap pengelolaan keuangan daerah, maka pelaporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah mampu memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan tersebut adalah valid.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji hipotesis H_2 diketahui bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian intern di dinas-dinas kabupaten Muaro Jambi belum diterapkan secara efektif, sehingga tidak dapat meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Muaro Jambi.

Sistem pengendalian intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Untuk mencapai informasi yang akurat diperlukan komponen pengendalian atau kontrol (Wahyono, 2004). Komponen pengendalian atau kontrol dapat menjaga sistem informasi dari kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Dengan adanya komponen pengendalian tersebut maka dapat menghasilkan informasi yang andal. Keterandalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari aspek atau lingkungan pengendalian.

Pengaruh Sumberdaya Manusia terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji hipotesis H_3 diketahui bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti sumber daya manusia di dinas-dinas kabupaten Muaro Jambi belum memadai, karena sebagian besar pegawai sub bagian keuangan tidak menguasai ilmu akuntansi hal ini dilihat dari keterangan pendidikan yang diperoleh dari identitas responden, selain itu pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi berjalan dengan baik pada instansi pemerintah masih minim dilakukan.

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan dan pendidikan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi guna mencapai tujuannya.

Manfaat dan dampak dari penyelenggaraan pendidikan adalah meningkatkan keahlian kerja, pengurangan keterlambatan kerja, kemangkiran, serta perpindahan tenaga kerja, pengurangan timbulnya kecelakaan dalam bekerja, dan peningkatan produktivitas kerja

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis H_4 diketahui bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, hal ini berarti bahwa teknologi informasi tidak

dimanfaatkan secara optimal, disebabkan karena teknologi informasi belum sepenuhnya memadai di dinas-dinas kabupaten Muaro Jambi.

Tujuan utama dari teknologi adalah penyediaan informasi untuk berbagai tujuan kegiatan manajerial dan penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam berbagai tingkat operasi di dalam organisasi (Muslichah, 2002).

Teknologi informasi memiliki lima fungsi pokok (Abdul, 2002), yaitu mengumpulkan data, pengolahan data, pelaporan data, penyimpanan data dan pengiriman data. Tujuan utama dari teknologi adalah menyediakan informasi untuk berbagai tujuan kegiatan manajerial dan penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam berbagai tingkat operasi di dalam organisasi.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uji hipotesis H_5 diketahui bahwa pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara efektif, sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas di dinas pemerintahan kabupaten Muaro Jambi digunakan secara optimal, dan penggunaan teknologi informasi yang ada sudah dimanfaatkan secara optimal juga. Sehingga dapat meningkatkan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Muaro Jambi dan membantu mengurangi risiko kesalahan material.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa keandalan adalah kemampuan untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut valid informasi yang memiliki kualitas andal informasi yang bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat dandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang jujur.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena pengawasan keuangan daerah di dinas-dinas kabupaten Muaro Jambi telah dilakukan secara efektif, sehingga dapat meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Muaro Jambi.
2. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena sistem pengendalian intern di dinas-dinas kabupaten Muaro Jambi belum diterapkan secara efektif, sehingga tidak dapat meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Muaro Jambi.
3. Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena sumber daya manusia di dinas-dinas kabupaten Muaro Jambi belum memadai.
4. Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, hal ini karena teknologi informasi tidak dimanfaatkan secara optimal.
5. Pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara efektif, sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas di dinas pemerintahan kabupaten Muaro Jambi digunakan secara optimal, dan penggunaan teknologi informasi yang ada sudah dimanfaatkan secara optimal juga.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini khususnya pada pemerintahan kabupaten Muaro Jambi untuk terus meningkatkan pengawasan Pemerintah Daerah di kabupaten Muaro Jambi sehingga dapat meningkatkan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Muaro Jambi dan membantu mengurangi risiko kesalahan material. pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

References

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Erlangga. Jakarta.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP STIE YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Muslichah. (2002). Pengaruh Teknologi Informasi, Saling Ketergantungan, Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi Petra*. 4(2), 106-125.
- Noto A., & Soekidjo. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPF. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Wahyono, T. (2004). *Sistem Informasi Akuntansi*. Andi. Yogyakarta.